

**RENCANA KERJA
(RENJA)
2023**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas Perangkat Daerah memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yang ada baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

12. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan daerah;
- b. Menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Sedangkan penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
- b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
- c. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

14. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RK
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

□ Evaluasi Program Tahun 2021

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya yang bersumber dari:

1. Daerah (APBD)	Rp 39.236.712.000,-
2. DAK	Rp 2.500.243.000,-
3. DBHCHT	Rp 1.350.000.000,-
Total keseluruhan anggaran sebesar Rp 43.086.955.000,-	

Secara ringkas komposisi penggunaan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar:	Rp 11.865.127.000,-
Realisasi:	Rp 11.633.165.909,-
2. Belanja Barang dan Jasa:	Rp 5.026.447.000,-
Realisasi:	Rp 3.321.523.972,-
3. Belanja Modal :	Rp 26.195.381.000,-
Realisasi:	Rp 25.034.254.304,-

Tabel yang perlu disajikan adalah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3														
3	30													
3	30	03												
3	30	03	2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Sarpras perdagangan yang representative (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, Mushola, dll)	20	114	95	88	92,63	4	206	1030
						Pendapatan retribusi pelayanan pasar	41.438.892.000	7.106.851.932	7.934.344.000	13.294.860.152	167,56	8.287.778.400	28.689.490.484	69,23
3	30	04												
3	30	04	2	02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaku usaha dari konsumen yang difasilitasi pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen	65.165	4.855	4.200	8.816	209,90	13.033	26.704	40,99

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
3	30	05	2	01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai ekspor barang (USD)	162.068	124.840	165.917	121.137	73,01	32.413	278.390	171,77
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
3	30	06	2	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
3	30	07	2	01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
3	31	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	31	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	31	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	31	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
3	31	02	2	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang berkembang	450	60	182	115	63,19	450	625	138,88
						Jumlah IKM yang meningkat penerapan tehnologi dan standar produk industri daerah	100	0	188	124	65,96	100	224	44,8

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah IKM yang meningkat nilai tambah dan daya saing produk unggulan	50	30	60	60	100	50	140	280

Boyolali, 2022

KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN BOYOLALI,



KARSINO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621215 198503 1 013

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali bisa dikatakan sebagai Dinas yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam indikator kinerja utama (IKU).

Sebanyak 9 indikator utama yang telah tercapai adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan kenaikan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan.

Peningkatan sektor perdagangan diupayakan pula melalui peningkatan pemasaran produk daerah namun demikian nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai 121,137 juta USD, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 124,840 juta USD.

Peningkatan sektor perindustrian diupayakan pula melalui meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah yang diukur dengan indikator jumlah IKM yang berkembang dan mampu mengakses pasar, pada tahun 2021 pertumbuhan industri Kabupaten Boyolali meningkat 1,23%.

Seluruh kinerja pelayanan tersebut didukung dengan kinerja administrasi dan urusan rutin yang berjalan dengan baik. Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, diperkirakan akan mencapai target 100 persen sesuai dengan rencana.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan pasar dalam bentuk pengelolaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, Sesuai dengan target pendapatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.934.344.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.294.860.152,- atau 167,56 %. Hal ini menunjukkan pendapatan mengalami peningkatan

di tahun 2021 dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp 7.106.851.932,-

Setiap tahun ditentukan target pendapatan yang diharapkan dapat tercapai. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah.

Pendapatan pasar hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah pedagang, los, kios di pasar relatif sama. Peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Selain di bidang pendapatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Bidang Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan pasar, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar (kaki lima dan asongan) merupakan agenda tetap tahunan dan sampai dengan saat ini segala permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan penataan pedagang dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana paparan di atas terangkum secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, Mushola, dll)			95	4	4	4	88	-	2	1	
	Pendapatan retribusi pelayanan pasar			7.934.348.400	8.287.778.400	8.287.778.400	8.287.778.400	13.294.860.152	-	8.287.778.400	8.287.778.400	
	Pelaku usaha dari konsumen yang difasilitasi pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen			4.200	13.033	13.033	13.033	8.816	-	13.033	13.033	
	Nilai ekspor barang (USD)			165.917	32.413	32.413	32.413	121.137	-	32.413	32.413	
	Jumlah IKM yang berkembang			182	450	450	450	115	-	450	450	
	Jumlah IKM yang meningkat penerapan teknologi dan standar produk industri daerah			188	100	100	100	124	-	100	100	
	Jumlah IKM yang meningkat nilai tambah dan daya saing produk unggulan			60	50	50	50	60	-	50	50	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk

meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Boyolali mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Kondisi Negara pada tahun 2021 mengalami pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia. Dampak dari penyebaran covid-19 mengakibatkan penurunan perekonomian di seluruh dunia. Dari pengambilan data yang dilakukan lapangan, dampak covid-19 diantaranya:

1. Terjadi penundaan pesanan dari Negara-Negara yang berdampak covid-19. Negara-Negara di eropa yang sudah *lockdown* otomatis kegiatan export maupun import terganggu.
2. Menurunnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk IKM, sehingga berdampak pada penurunan produksi IKM.
3. Terganggunya pengiriman bahan baku yang berasal dari luar Boyolali sehingga mempengaruhi produksi IKM.

Untuk mengatasi dampak covid-19 pemerintah membuat sejumlah kebijakan untuk mengatasi dampak covid-19, diantaranya Permendagri No. 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam mengatasi dampak covid-19 di bidang ekonomi yaitu dengan cara *recovery* ekonomi. Pemerintah memberikan stimulus untuk perkembangan dunia usaha yang diakibatkan oleh kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar). Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sebagai tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan sektor perdagangan dan sektor perindustrian. Dari sektor perdagangan membuat program Pameran Dagang Nasional untuk mendongkrak pemasaran produk lokal yang dihasilkan oleh IKM yang ada di Boyolali. Dari sektor perindustrian diadakannya pelatihan untuk IKM yang terdampak. Dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2021 mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan di akibatkan oleh pembatasan pertemuan (*social distancing*). Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan masa

sudah tidak dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya *pandemic* atau kondisi *new normal*. Berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang perdagangan dan industri yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan dan industri di Kabupaten Boyolali.

Untuk meningkatkan daya saing produk-produk unggulan kabupaten Boyolali, juga dikembangkan forum-forum komunikasi dan forum diskusi antar lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan ekonomi daerah sebagai *stakeholders* daerah dalam pengembangan ekonomi.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu:

1. Terbatasnya ruang gerak pelaksanaan tera ulang diakibatkan oleh situasi dampak *covid-19*.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kemetrolgian mendukung pelaksanaan tera dengan protokol kesehatan.

3. Tidak terlaksananya pameran dikarenakan kondisi covid-19 untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu berkumpulnya masa (*social distancing*).
4. Pembatasan jangkauan pasar mengakibatkan terbatasnya promosi perdagangan ke dalam dan luar negeri.
5. Masih rendahnya sarana prasarana dalam menangani dampak *Covid-19* di pasar dan PKL untuk menghadapi kondisi *new normal*.
6. Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan.
7. Kurangnya pengembangan pemasaran *online* untuk memasarkan produk IKM.
8. Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif.
9. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berdampak pada kurang optimalnya pelayanan bagi pasar dan PKL

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, maka bisa berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan. Beberapa usaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya:

- ✓ Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Meningkatkan pemasaran produk unggulan IKM melalui penjualan *online*.
- ✓ Meningkatkan kualitas IKM melalui pelatihan.
- ✓ Melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan di lingkungan Disdagperin dalam pelaksanaan *new normal* dengan memperhatikan protokol kesehatan diantaranya: anjuran memakai masker, anjuran menjaga jarak, melakukan *social distancing* baik pedagang dan pembeli di pasar,

memfasilitasi tempat cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan.

- ✓ Mengkondisikan kegiatan pelatihan, pengawasan perdagangan, dan pelaksanaan tera ulang menggunakan protokol kesehatan.
- ✓ Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pasar dan PKL dengan kondisi *new normal*

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2023. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan pelaksanaan *new normal*. Kegiatan tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali termasuk dalam kelompok tugas *recovery* ekonomi. Kegiatan *recovery* ekonomi memfokuskan pemulihan ekonomi yang terdampak dari kondisi covid-19.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	12	55.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	12	55.000.000	
1.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	30.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	30.000.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	30.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	30.000.000	
1.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota		Persentase realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran	100	25.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota		Persentase realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran	100	25.000.000	
	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Jumlah pengawasan penyaluran pupuk dan penggunaan pupuk bersubsidi	52 kali	25.000.000	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Jumlah pengawasan penyaluran pupuk dan penggunaan pupuk bersubsidi	52 kali	25.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		470.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		470.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.		470.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.		470.000.000	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan		470.000.000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan		470.000.000	
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Prosentase alat UTPP yang sudah tertib ukur	62	2.280.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Prosentase alat UTPP yang sudah tertib ukur	62	2.280.000.000	
3.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase alat UTPP yang ditera/tera ulang sah	62	2.280.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase alat UTPP yang ditera/tera ulang sah	62	2.280.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat UTPP yang ditera/tera ulang yang sah	13.033 UTPP	2.250.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat UTPP yang ditera/tera ulang yang sah	13.033 UTPP	2.250.000.000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	-	30.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	-	30.000.000	
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)	0.72	45.213.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)	0.72	45.213.000	
4.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaku usaha yang memperoleh promosi	60 pelaku usaha	45.213.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaku usaha yang memperoleh promosi	60 pelaku usaha	45.213.000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	50 pelaku usaha	45.213.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	50 pelaku usaha	45.213.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Informasi perdagangan barang yang harus diawasi		25.000.000			Informasi perdagangan barang yang harus diawasi		25.000.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar	100	17.311.314.170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar	100	17.311.314.170	
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	15.231.994.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	15.231.994.800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	12 bulan	12.773.029.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	12 bulan	12.773.029.500	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak	12 bulan	2.458.965.300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak	12 bulan	2.458.965.300	
5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkkantoran perangkat daerah	100	1.141.205.370	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkkantoran perangkat daerah	100	1.141.205.370	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	219.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	219.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100	27.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100	27.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya kebutuhan BBM/ logistik kantor	12 bulan	325.273.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya kebutuhan BBM/ logistik kantor	12 bulan	325.273.300	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	149.253.390	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	149.253.390	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran	12 bulan	2.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran	12 bulan	135.540.680	Penyediaan Bahan/Material		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran	12 bulan	135.540.680	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	1 tahun	135.938.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	1 tahun	135.938.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya kebutuhan SPPD dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	139.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya kebutuhan SPPD dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	139.700.000	
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100	448.141.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100	448.141.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	100	3.839.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	100	3.839.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon	12 bulan	434.302.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon	12 bulan	434.302.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum	100	10.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum	100	10.000.000	
5.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	489.973.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	489.973.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	258.973.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	258.973.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	33.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	33.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	198.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	198.000.000	
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang terlatih	4.78	3.714.363.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang terlatih	4.78	3.714.363.000	
6.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terlatih	510 IKM	3.714.363.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terlatih	510 IKM	3.714.363.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	450 IKM	3.714.363.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	450 IKM	3.714.363.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	84.09	106.804.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	84.09	106.804.000.000	
7.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik	37	106.804.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik	37	106.804.000.000	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	2	106.804.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	2	106.804.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023, disamping berpedoman pada Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boyolali Tahun Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke PD sesuai tupoksi. Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat memperbaiki dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dengan memfokuskan pengembangan industri dan perdagangan.

Kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam draft penyusunan renja Perangkat Daerah pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masyarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 2.5:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Boyolali
Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Penataan dan Revitalisasi Pasar Karanggede	Kecamatan Karanggede	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	3.000.000.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yaitu:

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Kurangnya peningkatan tenaga kerja industri yang kompeten.	Keterbatasan SDM	Pelatihan industri berbasis kompetensi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Kurangnya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan standarisasi industri
Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri.	Kurangnya kemampuan industri dalam negeri.	Kurangnya penggunaan teknologi untuk peningkatan industri dalam negeri	Adanya dorongan penggunaan teknologi guna peningkatan industri dalam negeri
Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian	Kurangnya komunikasi yang baik diantara industri	Adanya keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar
Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum optimalnya pembinaan industri kecil	Masih kurangnya data industri	Tumbuhnya industri di tengah pandemi
Meningkatnya Persebaran Industri	Masih tersentranya kawasan industri	Keterbatasan sarpras pendukung Kawasan industri	Adanya peraturan yang mendorong pembentukan kawasan industri

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yaitu:

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Belum optimalnya ekspor produk unggulan	Kurangnya SDM yang menguasai ekspor dan belum banyaknya usaha yang mempunyai ijin usaha	Banyak kualitas produk unggulan yang banyak
Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat	Kurangnya kekuatan hukum untuk menindak pelaku usaha yang curang	Perlu pengawasan dan monitoring ke lapangan
Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Belum optimalnya teral dan tera ulang bagi alat UTP	Keterbatasan SDM dan peralatan metrologi legal	Sudah ada UPT metrologi legal supaya ditingkatkan kinerjanya
Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Masih kurangnya media pengenalan produk-produk unggulan	Keterbatasan SDM pelaku usaha	Banyaknya produk-produk unggulan yang bisa ditawarkan
Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Belum optimalnya serapan di SRG	Belum terdatanya Gudang yang ada	Adanya sosialisasi dari Provinsi terkait dengan pendataan gudang
Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional	Nilai SKM yang masih perlu ditingkatkan	Kebiasaan lama yang sulit berubah	Tambahan penghasilan yang semakin baik
Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	Belum optimalnya pengembangan SDM	Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM	SDM yang berkualitas

3.1.3. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Selain itu dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 juga telah menyinkronkan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Optimalisasi kawasan industri dan industri yang menyerap tenaga kerja	Belum optimalnya pembinaan terhadap industri	Masuknya industri besar	Peningkatan SDM dengan bintek dan magang
Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri	Belum optimalnya pembinaan terhadap industri	Keterbatasan SDM yang ada	Anggaran yang cukup dari pemerintah untuk pengembangan usaha
Pengembangan inovasi teknologi produksi	Kurangnya kemampuan industri dalam negeri.	Kurangnya penggunaan teknologi untuk peningkatan industri dalam negeri	Adanya dorongan penggunaan teknologi guna peningkatan industri dalam negeri
Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk	Belum optimalnya pembinaan industri kecil	Masih kurangnya data industri	Tumbuhnya industri di tengah pandemi
Harmonisasi peran Stakeholder hulu hilir Pengembangan bahan baku industri substitusi impor	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian	Kurangnya komunikasi yang baik diantara industri	Adanya keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar
Peningkatan data informasi industri dan kawasan industri Integrasi sektor pendukung urusan industri.	Kurang optimalnya aplikasi yang ada	Masih adanya industri yang belum terdata	Adanya aplikasi informasi industri
Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berdaya saing.;	Kurangnya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan standarisasi industri
Pengembangan perdagangan dan perijinan secara online.	Kurangnya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan standarisasi industri
Perluasan ekspor (diversifikasi pasar dan produk ekspor, peningkatan standar dan mutu prduk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);	Belum optimalnya ekspor produk unggulan	Kurangnya SDM yang menguasai ekspor dan belum banyaknya usaha yang mempunyai ijin usaha	Banyak kualitas produk unggulan yang banyak

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;	Masih kurangnya media pengenalan produk-produk unggulan	Keterbatasan SDM pelaku usaha	Banyaknya produk-produk unggulan yang bisa ditawarkan
Peningkatan kualitas, pengawasan, pelayanan dan pengujian mutu produk.	Belum optimalnya teral dan tera ulang bagi alat UTP	Keterbatasan SDM dan peralatan metrologi legal	Sudah ada UPT metrologi legal supaya ditingkatkan kinerjanya

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 s/d 2026, maka telah dibuat Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI”

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Disini ada 5 Misi yang ditentukan oleh Kepala Daerah periode 2021-2026, yaitu :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung:

Misi ke satu yaitu “Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan” dan Misi Ketiga yaitu “Boyolali Kota Susu, Lumbung pangan Nasional” Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16

Tahun 2016 maka terbentuk Perangkat Daerah Baru yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 ditetapkan maka berdampak bahwa bidang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali bertambah menjadi 4 (empat) yaitu Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Pendapatan, Bidang Infrastruktur Pembinaan dan Penataan Pedagang, dan Bidang Perindustrian.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ada 7 program dan 11 kegiatan baik belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah Kabupaten Boyolali juga ada yang diluar kabupaten bahkan luar provinsi. Kebutuhan dana APBD Rp 71.624.890.170,- APBN Rp 59.000.000.000,-

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal RK maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

PROGRAM (7)		KEGIATAN (11)		SUB KEGIATAN (25)
1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota	2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	3	Pameran Dagang Nasional

		Kabupaten/Kota		
3. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	4	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			5	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
4. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	5	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	6	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
			7	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			15	Penyediaan Bahan/Material
			16	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
7. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	25	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel. 4.1.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APB D Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3	30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
3	30	03	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Kab. Boyolali	84.09	0	-	26.472.000.000	26.472.000.000	86.36	26.472.000.000
3	30	03	2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Boyolali	37	0	-	26.472.000.000	26.472.000.000	38	26.472.000.000
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Boyolali	1 Paket	0	-	26.472.000.000	26.472.000.000	1	26.472.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		12,16	380.000.000			380.000.000	-	12,45	450.000.000
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.			380.000.000	-	-	380.000.000	--	-	450.000.000
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan	Tingkat Nasional	5 pelaku usaha	380.000.000	-	-	380.000.000	--	-	450.000.000
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTP yang sudah tertib ukur	Kab. Boyolali	62	20.000.000			20.000.000	-	67	20.000.000
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase alat UTP yang ditera/tera ulang sah	Kab. Boyolali	62	20.000.000			20.000.000	-	67	20.000.000
			01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTP yang ditera/tera ulang yang sah	Kab. Boyolali	13.033 UTP	20.000.000			20.000.000	-	13.033 UTP	20.000.000
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)		0.72	22.790.000			22.790.000	-	0.77	45.213.000
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku usaha yang memperoleh promosi		60 pelaku usaha	22.790.000			22.790.000	-	70 pelaku usaha	45.213.000
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi		50 pelaku usaha	22.790.000	--	-	22.790.000	-	50 pelaku usaha	45.213.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								-		
3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar		100	15.118.377.050			15.118.377.050	-	100	15.925.539.000
3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	13.456.008.000			13.456.008.000	-	100	14.442.371.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun		12 bulan	11.047.758.000	-	-	11.047.758.000	-	12 bulan	12.206.948.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak		12 bulan	2.408.250.000	-	-	2.408.250.000	-	12 bulan	2.235.423.000
3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkkantoran perangkat daerah		100	883.490.550			883.490.550	-	100	620.205.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	5.700.000	-	-	5.700.000	-	12 bulan	6.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga		100	22.910.000	-	-	22.910.000	-	100	25.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM/ logistik kantor		100	294.865.500	-	-	294.865.500	-	100	250.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		100	130.335.000	-	-	130.335.000	-	100	30.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran		100	125.785.500	-	-	125.785.500	-	100	110.542.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman		100	117.405.000	-	-	135.938.000	-	100	98.663.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan SPPD dalam daerah dan luar daerah		12 bulan	186.489.550	-	-	186.489.550	-	12 bulan	100.000.000
3	31	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000			60.000.000			60.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			10.000.000			10.000.000			10.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			50.000.000			50.000.000			50.000.000
3	31	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100	403.470.000			403.470.000	-	100	482.533.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat		100	3.650.000	-	-	3.650.000	-	100	1.140.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon		100	394.820.000	-	-	394.820.000	-	100	475.300.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum		100	5.000.000	-	-	5.000.000	-	100	6.093.000
3	31	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah		100	315.408.500			315.408.500	-	100	320.430.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100	223.658.500	-	-	223.658.500	-	100	185.430.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		100	15.000.000			15.000.000		100	15.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100	30.000.000	-	-	30.000.000	-	100	20.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	46.750.000	-	-	46.750.000	-	100	100.000.000
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih		4.78	3.749.059.000	-	-	3.749.059.000	-	4.88	2.721.788.000
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terlatih		510 IKM	3.749.059.000	-	-	3.749.059.000	-	560 IKM	2.721.788.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		450 IKM	3.749.059.000	-	-	3.749.059.000	-	450 IKM	2.721.788.000
				TOTAL				45.762.226.050			45.762.226.050			45.654.540.000

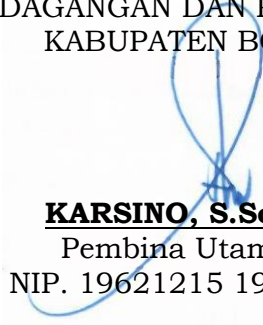
BAB V PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program dan 11 kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja PD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Boyolali. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Revisi 2021-2026.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2023 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali pada tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk

mewujudkan *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI,



KARSINO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621215 198503 1 013